

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Pj Gubernur Dihujani Kritik

Gambir, Warta Kota

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mendapatkan kritikan dari DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP.

"Perlu saya sampaikan kepada Pak Pj Gubernur ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gembong Warsono, Senin (19/12/2022).

Hal tersebut disampaikan saat Heru melakukan silaturahmi kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Gembong menilai Heru masih kurang dalam hal komunikasi publik.

Lantas, ia memberikan contoh terkait dengan aturan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

Diketahui, Heru menetapkan aturan batas usia maksimal bagi PJLP menjadi 56 tahun.

"Walaupun tujuan Pak Pj Gubernur sesuai dengan aturan yang ada. Namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa," ucap Gembong.

"Rakyat kecil yang mengais rezeki ibaratnya di got-got, menyapu jalanan, dan lain-lain, merasa gelisah," kata Gembong.

Belum Tepat

Gembong menegaskan bahwa kebijakan Heru dalam hal tersebut belum tepat.

Kemudian untuk komunikasi publik yang kedua, Gembong mencontohkan terkait perubahan logo dan slogan DKI Jakarta.

Diketahui logo dan slogan tersebut berubah dari 'Jakarta, Kota Kolaborasi' menjadi 'Jakarta, Sukses Jakarta untuk Indonesia'.

"Kami (DPRD) menjadi bulan-bulanan awak media karena komunikasi dari Pak Pj Gubernur kurang berjalan dengan baik," jelas Gembong.

Artinya kata Gembong, Heru diimbau harus lebih tegas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mampu menerjemahkan apa yang diperintahkan.

Gembong menjelaskan bahwa Heru tugasnya adalah membuat kebijakan. Sedangkan SKPD, lebih fokus kepada operasional dan implementasinya.

"Semoga ke depan semakin berbenah sehingga menjadi lebih baik, demi masyarakat Jakarta," pungkas Heru.

Sebelumnya ratusan PJLP di bawah Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta harap waswas.

Hal tersebut karena aturan terbaru PJLP yang dibatasi maksimal usia 56 tahun.

Di mana memang aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan PJLP di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah menandatangani Kepgub tersebut pada 1 November 2022 yang lalu.

"Kalau di Dinas LH sendiri paling enggak ada 500 sampai 600 PJLP yang usianya lebih dari 56 tahun," ujar Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto saat ditemui di Ruang Pola Bappeda, Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

Asep mengaku memang jumlah tersebut sangatlah luar biasa, sehingga menimbulkan keresahan baik bagi dirinya maupun para PJLP. (m36)